

PERBANDINGAN PENYERAPAN ANGGARAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

HariPurwanto¹,EkaYudhyani,²Camelia Verahastuti³.

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : 87purwantohari@gmail.com

Keyword :

*Budget Absorption, Covid
19 Pandemic*

ABSTRACT

The goal to be achieved in this study is to find out and analyze the differences in absorption before and after the covid-19 pandemic in the East Kalimantan Provincial Government.

The theoretical basis used is the basis of the theory that concerns public sector accounting, budgets, regional spending revenue budgets, budget absorption, and the covid 19 pandemic.

The analysis tool used is a shopping analysis consisting of: 2- difference test on average with the help of the SPSS (Statistical Package for Social Science) Version 26 for Window program.

The results of the study presented are: significant differences between budget absorption before and after the Covid-19 pandemic in the East Kalimantan Provincial Government where the results of Independent Sample Test through SPSS for Window version 26 amounted to 0.016 or smaller than 0.05; The significant difference between budget absorption before and after the Covid-19 pandemic in the East Kalimantan Provincial Government is due to prudence.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik merupakan tugas penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan pengelolaan keuangan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Proses pengelolaan keuangan pemerintahan daerah melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran/barang di pemerintahan daerah yang melaksanakan

berbagai program yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu pemerintahan daerah.

Peranan APBD sebagai instrumen kebijakan menunjukkan arti penting penyerapan anggaran dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah secara khusus dan nasional pada umumnya. Kualitas penyerapan anggaran berpengaruh terhadap perekonomian daerah sehingga dibutuhkan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang tepat sasaran.

Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah mulai dirasakan sejak awal Maret 2020 dan terus berkembang hingga saat ini dengan memberikan berbagai efek pada sisi-sisi strategis kehidupan masyarakat dan negara. Di sektor ekonomi dan keuangan, situasi pandemi memaksa pemerintah untuk melakukan revisi penghematan yang memangkas pagu belanja pemerintah dengan jumlah yang cukup signifikan.

Pemerintah mengambil tindakan pencegahan penularan Covid-19 berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 dengan Nomor 4, berisi secara garis besar untuk *refocussing* kegiatan, realokasi pada anggaran, serta percepatan proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus ini. Hal ini juga mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran terutama pada belanja untuk pegawai, belanja untuk barang operasional dan non operasional dan belanja yang menimbulkan modal.

Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah daerah harus menyesuaikan segala program kegiatan dari realokasi kegiatan sebanyak 35% ketiga bidang yaitu kesehatan, jaring sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 juga melakukan kebijakan rasionalisasi dan realokasi anggaran hal tertuang dalam surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/2553/0709- III/BPKAD tanggal 14 April 2020 tentang Rasionalisasi Belanja 50% pada SKPD Tahun 2020.

Berdasarkan fenomena yang disebutkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perbandingan Penyerapan Anggaran Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur”**.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. mengetahui perbedaan penyerapan anggaran sebelum dan sesudah pandemi covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

2. menganalisis perbedaan penyerapan anggaran sebelum dan sesudah pandemi covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018:11) : “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme dan analisa akuntansi di lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun proyek kerjasama sektor publik”.

Anggaran

Menurut Nafarin (2012:10) pengertian anggaran adalah Anggaran (*budget*) merupakan alat pengawasan dibidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non laba. Bagi suatu perusahaan, penyusunan anggaran merupakan alat yang dipakai untuk membantu aktivitas kegiatannya agar lebih terarah, misalnya untuk alat perencanaan, alat pengendalian dan lainnya. Dengan menggunakan data-data anggaran, maka perkembangan perusahaan akan dapat dipelajari dengan teliti dan berkesinambungan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah : “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tahun anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah meliputi masa satu tahun”.

Penyerapan Anggaran

Menurut Halim dan Bawono (2018:87) : “Penyerapan anggaran adalah kemampuan suatu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memaksimalkan penggunaan sumberdaya keuangan yang ada”.

Pandemi Covid-19

menurut Nurhasanah dan Pungki (2020:20) : “Pandemi covid-19 adalah wabah yang disebabkan penyakit virus corona 2 (SARS- CoV-2) yang pertama kali timbul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok yang menjangkit secara global ke seluruh dunia”.

Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan dasar teori yang diajukan, maka penulis mengajukan hipotesis apakah terdapat perbedaan penyerapan anggaran sebelum dan sesudah pandemi covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

METODE PENELITIAN

Definis Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyerapan anggaran pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah perbandingan antara realisasi anggaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pagu anggaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Pandemi covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 diseluruh wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Sebelum pandemi covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah keadaan sebelum munculnya pandemi covid-19 diseluruh wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Sesudah pandemi covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah keadaan setelah munculnya pandemi covid-19 diseluruh wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Samarinda, khususnya data perbandingan realisasi anggaran APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semester I Tahun 2019 (sebelum pandemi covid-19) terhadap realisasi anggaran realisasi anggaran APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semester I Tahun 2020 (sesudah pandemi covid-19)

Rincian Data Yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian :

1. Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Data pendukung lainnya.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji beda 2 rata-rata dengan bantuan program *SPSS (Statistical Package for Social Science) Versi 26 for Window*.

Alat Analisis Uji Beda (Uji t)

Menurut Ghozali (2018:98) adalah : “uji beda rata- rata dikenal juga uji-t

digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial”.

Pengelolaan data dari uji beda rata-rata pada penelitian ini menggunakan uji *Paired Sample T Test* pada program *SPPS Versi 26 for Window* dengan dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji statistik t adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini adalah hipotesis diterima jika terdapat perbedaan terhadap penyerapan anggaran sebelum dan sesudah pandemi covid-19, dan hipotesis ditolak jika tidak terdapat perbedaan terhadap penyerapan anggaran sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Uji (Uji t)

Berdasarkan hasil uji beda rata-rata (uji-t) diatas diperoleh bahwa nilai signifikan sebesar 0,016 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum Pandemi Covid-19 (30 Juni 2020) dan sesudah Pandemi Covid-19 (30 Juni 2020).

Tabel 1. Independent Samples Tes
Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
realisasi	Equal variances assumed	2,347	,130	2,458	78	,016	4,84975	1,97303	,92174	8,77776
	Equal variances not assumed			2,458	74,054	,016	4,84975	1,97303	,91844	8,78106

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2021

Pembahasan

Hasil Perbandingan Penyerapan Anggaran Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Semester I Tahun Anggaran 2019

Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semester I tahun anggaran 2019 sebesar 28,20 % atau Rp. 3.008.326.773.483,00 dari anggaran sebesar Rp. 10.669.667.000.000,00. Dilihat dari besaran prosentase yang hanya 28,20% hal ini menjelaskna bahwan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan belum optimal dikarenakan seharusnya pada semester I umumnya besaran penyerapan anggaran sebesar 50%.

Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 40 (empat puluh) terdapat 27 (dua puluh tujuh) perangkat daerah yang penyerapan anggarannya diatas serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau sebesar 67,50%. Perangkat daerah yang penyerapan anggaran dibawah serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 32,50% atau 13 (tiga belas) perangkat daerah.

2. Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Semester I Tahun Anggaran 2020

Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semester I tahun anggaran 2019 sebesar 24,98 % atau Rp. 3.070.545.720.061,00 dari anggaran sebesar Rp. 12.293.795.000.006,00. Dilihat dari besaran prosentase yang hanya 24,98% hal ini menjelaskna bahwan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan belum optimal dikarenakan seharusnya pada semester I umumnya besaran penyerapan anggaran sebesar 50%.

Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 40 (empat puluh) terdapat 27 (dua puluh tujuh) perangkat daerah yang penyerapan anggarannya diatas serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau sebesar 67,50%. Perangkat daerah yang penyerapan anggaran dibawah serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 32,50% atau 13 (tiga belas) perangkat daerah.

3. Perbandingan Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum pandemi covid-19 (30 Juni 2019) sebesar 28,20% dan sesudah pandemi Covid-19 (30 Juni 2020) sebesar 24,98%. Penyerapan anggaran semester I Tahun 2020 terjadi kontraksi penyerapan anggaran sebesar 3,22% dari semester I tahun sebelumnya hal ini wajar dikarenakan adanya pemberlakuan kebijakan terkait pencegahan penularan covid-19 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum pandemi covid-19 (30 Juni 2019) dan sesudah pandemi Covid-19 (30 Juni 2020) sebagai berikut :

Tabel 2. : Prosentase Penyerapan Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

No	Perangkat Daerah	Juni 2019	Juni 2020	Selisih
		%	%	%
1	Badan Kepegawaian Daerah	28,97	32,47	3,50
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46,31	35,18	-11,13
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	34,18	32,03	-2,15
4	Badan Pendapatan Daerah	40,55	29,95	-10,60
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	42,88	29,26	-13,63
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	33,16	22,90	-10,26
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25,26	27,06	1,80
8	Badan Penghubung Provinsi	37,50	30,79	-6,71
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39,04	28,66	-10,38
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	39,96	17,16	-22,80
11	Dinas Kehutanan	16,50	18,08	1,58
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	25,62	22,77	-2,84
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33,78	21,24	-12,55
14	Dinas Kesehatan	15,68	28,57	12,89
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	34,37	25,50	-8,88
16	Dinas Lingkungan Hidup	33,90	26,70	-7,20
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	29,60	22,21	-7,40
18	Dinas Pariwisata	38,45	22,75	-15,70
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	10,92	12,84	1,92

20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	43,05	31,91	-11,15
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	31,21	25,21	-6,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40,19	25,91	-14,28
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27,96	28,28	0,32
24	Dinas Perhubungan	18,44	23,98	5,54
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	26,83	20,79	-6,04
26	Dinas Perkebunan	25,31	18,61	-6,70
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	40,49	33,35	-7,13
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	26,11	19,78	-6,33
29	Dinas Sosial	40,49	37,60	-2,89
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35,60	29,70	-5,90
31	DPRD	46,45	46,51	0,06
32	Inspektorat	38,51	26,25	-12,25
33	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	41,24	35,41	-5,83
34	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	8,89	46,16	37,27
35	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	45,59	42,16	-3,43
36	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	25,59	39,65	14,06
37	Satuan Polisi Pamong Praja	46,20	35,50	-10,70
38	Sekretariat Daerah	34,64	28,51	-6,13
39	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	37,92	20,28	-17,65
40	Sekretariat DPRD	44,65	36,33	-8,32
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	28,20	24,98	-3,22

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2021

Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum pandemi Covid-19 dan sesudah pandemi Covid-19 menunjukkan perbedaan yang signifikan, hal ini terlihat dari data diatas terdapat selisih minus pada 30 (tiga puluh) perangkat daerah serta selisih plus pada perangkat daerah lainnya. Adapun 10 (sepuluh) perangkat daerah yang mengalami selisih minus tertinggi yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Perangkat Daerah Selisih Negatif Tertinggi

No	Perangkat Daerah	Juni 2019	Juni 2020	Selisih
		%	%	%
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	39,96	17,16	-22,80
2	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	37,92	20,28	-17,65
3	Dinas Pariwisata	38,45	22,75	-15,70
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40,19	25,91	-14,28
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	42,88	29,26	-13,63
6	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33,78	21,24	-12,55
7	Inspektorat	38,51	26,25	-12,25
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	43,05	31,91	-11,15
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46,31	35,18	-11,13
10	Satuan Polisi Pamong Praja	46,20	35,50	-10,70

Sumber : Data diolah oleh peneliti Tahun 2021

Adapun perangkat daerah teknis dibidang kesehatan mengalami kontraksi positif penyerapan anggaran sebagai berikut :

Tabel 4. 10 Perangkat Daerah Selisih Positif Tertinggi

No	Perangkat Daerah	Juni 2019	Juni 2020	Selisih
		%	%	%
1	DPRD	46,45	46,51	0,06
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27,96	28,28	0,32
3	Dinas Kehutanan	16,50	18,08	1,58
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25,26	27,06	1,80
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	10,92	12,84	1,92
6	Badan Kepegawaian Daerah	28,97	32,47	3,50
7	Dinas Perhubungan	18,44	23,98	5,54
8	Dinas Kesehatan	15,68	28,57	12,89
9	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	25,59	39,65	14,06
10	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	8,89	46,16	37,27

Sumber : Data diolah oleh peneliti Tahun 2021

Data diatas menunjukkan perangkat daerah yang mengalami kontraksi positif penyerapan anggaran sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini menggambarkan kinerja perangkat tersebut walaupun dalam masa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Terdapat 3 (tiga) perangkat daerah teknis dibidang kesehatan yang mengalami peningkatan penyerapan anggaran sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, hal ini menggambarkan hal semestinya dikarenakan ketiga perangkat daerah tersebut merupakan *leading sector* dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 sehingga sangat baik jika anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diserap dengan program dan kegiatan yang diharapkan berdampak pada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. adanya perbedaan signifikan antara penyerapan anggaran sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimana hasil *Independent Sample Test* melalui *SPSS for Window versi 26* sebesar 0,016 atau lebih kecil dari 0,05.

2. Perbedaan signifikan antara penyerapan anggaran sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan sikap kehati-hatian pelaksana teknis khususnya dalam hal pengadaan barang jasa penanganan pandemi Covid-19 oleh perangkat daerah teknis terkait dan kekosongan barang atau alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dikarenakan tingginya permintaan secara bersamaan

Saran

1. Perlu dibuat aturan yang menjamin pelaksana teknis kegiatan organisasi perangkat daerah dalam mengeksekusi program dan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat khususnya dalam keadaan pandemi Covid-19.
2. Untuk penelitian berikutnya, harus dilakukan penelitian lebih lanjut kedepannya apakah efektivitas penyerapan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur.

REFERENCES

- Anonim. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. Dan Icuk Ranga Bawono. 2018. *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah : Hukum, Kerugian Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Andi
- Nafarin, M. 2012. *Penanganan Perusahaan (Edisi 3)*. Jakarta : Salemba Empat
- Nurhasanah, Siti dan Pungki. 2020. *Manajemen Pembelajaran Daring di Musim Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al-Madinah*
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.